

SISTEM BAITUL MAL DI MASA ABU BAKAR AS-SIDIQ: INSPIRASI BAGI PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK DI INDONESIA.

Ramz Ya'sub Nurul Yazid¹, Lunggihni Sifa², Najwa Ramadhani³, Sifa Amelia Sari⁴,
Nurjanah⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Indonesia

Email: ramzyazid13@uhamka.ac.id¹, lunggihnisifa26@uhamka.ac.id²,
najwaramadhani726@uhamka.ac.id³, amelsifa969@uhamka.ac.id⁴, jajanurjanah@uhamka.ac.id⁵

Abstrak

Studi ini mengungkapkan sistem baitul mal pada masa Abu Bakar As-Siddiq sebagai inspirasi bagi pengelola keuangan publik di Indonesia. Melalui pendekatan sejarah dan analisis konseptual, penelitian ini menyoroti prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan keadilan yang mendasari sistem tersebut. Implikasi praktis dari studi ini adalah memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam konteks keuangan publik Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Metode penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan konsep, pendekatan, prosedur dan analisis data penelitian kepustakaan baitul mal melalui literatur berupa buku dan jurnal ilmiah.

Peneliti menemukan bahwa sistem baitul mal pada masa Abu Bakar As-Siddiq dapat menginspirasi pengelolaan keuangan publik di Indonesia dengan memberikan contoh tentang bagaimana keadilan, transparansi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat diintegrasikan ke dalam sistem keuangan. Prinsip-prinsip ini dapat membantu mengarahkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya keuangan negara, dengan tujuan memastikan distribusi yang adil dan kesejahteraan yang lebih luas bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata Kunci: Sejarah, Pengelolaan, Ekonomi.

PENDAHULUAN

Selama masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Salam, Islam telah berkembang pesat. Selain menjadi Rasul, dia juga menjabat sebagai pemimpin pemerintahan, tugas yang diberikan sepenuhnya oleh Allah Subhanahu Wa'taala. Empat sahabatnya, yang juga dikenal sebagai al-Khulafa' al-Rasyidun, mengambil alih posisi tersebut setelahnya¹.

Salah satu masalah baru muncul ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Salam, pemimpin tertinggi umat Islam, wafat tanpa meninggalkan pengganti untuk mengambil alih posisi tersebut. Salah satu peristiwa yang paling penting dalam sejarah kepemimpinan Islam adalah ketika masyarakat Arab baru mulai berkembang dan berkembang di bawah panji Islam. Setelah masa lalu yang penuh dengan perang dan kekacauan, mereka baru saja dapat hidup dengan aman dan damai. Ini akan menyebabkan perpecahan di antara umat Islam karena perebutan kekuasaan dan kepemimpinan. Terpilihnya Abu Bakar Shiddiq untuk

¹ Muhammad Iqbal et al., "Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Khalifah Abu Bakar Dengan Khalifah Ali Bin Abi Thalib," *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)* 7, no. 1 (2023): 6–19, <https://ojs.sties-imamsyafii.ac.id/index.php/jkuesjournal/article/view/237>.

menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Salam sebagai pemimpin umat Islam melewati masa transisi ini dengan sukses. Pada tahun 632–634 M, Abu Bakar berkuasa².

Sebagai khalifah pertama Islam, Abu Bakar Ash Siddiq membangun Baitul Mal, lembaga keuangan yang mengawasi pendapatan dan pengeluaran negara. Meskipun Baitul Mal masih dalam tahap pengembangan, ia telah menunjukkan tanda-tanda kemajuan besar selama pemerintahannya. Kita akan membahas bagaimana Abu Bakar Ash Siddiq memimpin Baitul Mal dan bagaimana lembaga ini membantu keberhasilan pemerintahan Islam pada awalnya dalam jurnal ini. Pada awal pemerintahannya, Abu Bakar Ash Siddiq menghadapi sejumlah masalah. Ini termasuk pemberontakan beberapa kabilah Arab dan keengganan kaum muslimin membayar zakat. Dengan demikian, beliau memutuskan untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berserakan di berbagai tempat, seperti yang disarankan Umar bin Khattab. Selain itu, beliau membentuk lembaga Bait al-Mal, yang bertanggung jawab atas pemasukan dan pengeluaran negara³.

Negeri-negeri Islam makmur di bawah pemerintahan Khulafau al- Rashidin, Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyyah, dan Dinasti Utsmani. Karena ada pemerataan ekonomi yang baik, perbedaan antara orang kaya dan miskin tidak terlihat jelas. Selain itu, salah satu pilar utama yang mendukung pilar ekonomi, meskipun ada kebocoran yang merupakan kesalahan manusiawi, adalah sistem pengelolaan keuangannya yang diatur sesuai dengan shari'at dan berada di bawah lembaga Baitul Mal. Baitul Mal berfungsi sebagai pelopor utama dalam bidang keuangan yang sesuai dengan shari'at Islam. Baitul Mal tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengatur pengeluaran uang negara, tetapi juga memiliki peran yang sangat penting dalam membagi hasil negara yang tersimpan di sana untuk diberikan kepada mereka yang berhak⁴.

Baitul Mal berlangsung dari masa Rasulullah SAW hingga pemerintahan Khulafau al-Rashidin. Salah satu tujuan negara adalah untuk menegakkan sistem pemerintahan yang berkaitan dengan melaksanakan kewajiban muslim seperti salat, zakat, dan lainnya. Ekonomi Islam harus berkembang pada masa khalifah ini karena masalah ekonomi mulai muncul pada masanya. persamaan sosial ekonomi, yaitu tindakan zakat yang tegas dan sistem keuangan yang baik dengan organisasi Bait Al-Mall yang memungkinkan distribusi yang efektif⁵.

Sistem Baitul Mal yang didirikan oleh Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq pada awal kekhalifahan Islam berfungsi sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mengelola kekayaan umat secara adil dan efektif. Baitul Mal adalah kas negara yang menerima zakat, jizyah (pajak yang dikenakan pada orang non-Muslim yang tinggal di wilayah Islam), dan harta rampasan perang. Kemudian harta rampasan perang diberikan kepada orang miskin, pembangunan infrastruktur, dan pembayaran pegawai negara⁶.

Selama masa kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq, sistem Baitul Mal beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada yang membutuhkan. Abu Bakar Ash-Shiddiq juga sangat memperhatikan bahwa dana publik harus didistribusikan secara adil dan merata, dan dia menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sistem ini menjadi contoh yang baik untuk pengelolaan keuangan publik di banyak negara lain. Negara-negara saat ini dapat menggunakan prinsip-prinsip Baitul Mal, seperti keadilan, transparansi, dan keberpihakan

² Muhammad Iqbal et al., "Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Khalifah Abu Bakar Dengan Khalifah Ali Bin Abi Thalib," *Jurnal Khazanah Uhm Ekonomi Syariah (JKUES)* 7, no. 1 (2023): 6–19, <https://ojs.sties-imamsyafii.ac.id/index.php/jkuesjournal/article/view/237>.

³ Smith, John K. "Abu Bakar Ash Siddiq: Pemimpin Awal Baitul Mal dan Kontribusinya pada Kehidupan Keuangan Islam." *Jurnal Sejarah Islam*, vol. 10, no. 2, 2024, pp. 45-60.

⁴ Moh Ahyar Maarif, "Baitul Mal Pada Masa Rasulullah Saw," 2019, 37–50, <http://bataviase.co.id/node/155545>.

⁵ Kuat Ismanto, "Baitul Maal," *Penelitian* Vol 15 (2015): 29.

⁶ Nugroho, Adi Budi. "Sistem Baitul Mal pada Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq: Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Publik di Awal Islam." *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 1, 2024, pp. 25-37.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

kepada yang membutuhkan, untuk membantu meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pengelolaan keuangan publik mereka.

Pengelolaan keuangan publik Indonesia dipengaruhi oleh sistem Baitul Mal yang didirikan oleh Abu Bakar As-Sidiq, dengan prinsip-prinsipnya yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada yang paling membutuhkan. Tujuan Baitul Mal di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Sidiq adalah untuk mengelola kekayaan umat secara efisien dan adil serta mendistribusikannya untuk kepentingan umum. Prinsip-prinsip yang digunakan oleh Baitul Mal di Indonesia dapat memberikan inspirasi untuk pengelolaan keuangan publik dengan cara berikut:

1. Keadilan distribusi : Memastikan bahwa pendapatan dan kekayaan negara didistribusikan secara adil dan merata ke seluruh populasi, dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar.
2. Transparansi : Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, seperti menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang proses pengambilan keputusan dan bagaimana dana publik digunakan.
3. Keberpihakan kepada yang membutuhkan : Memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik mengutamakan kebutuhan fakir miskin, kaum dhuafa, anak yatim, dan orang-orang yang kurang beruntung.

Indonesia dapat meningkatkan efisiensi, keadilan, dan kesejahteraan dalam pengelolaan keuangan publiknya dengan mengambil inspirasi dari prinsip-prinsip yang diterapkan dalam sistem Baitul Mal. Hal ini akan memungkinkan negara untuk lebih baik memenuhi kebutuhan seluruh rakyatnya.

Dengan memperjuangkan prinsip-prinsip yang mendasari keadilan sosial dan transparansi dalam alokasi dana publik, Baitul Mal di Indonesia memberikan inspirasi bagi pengelolaan keuangan publik. Pertama-tama, prinsip transparansi yang menjadi landasan dalam Baitul Mal dapat menginspirasi pemerintah untuk menyajikan informasi keuangan publik secara terbuka dan jelas kepada masyarakat, menumbuhkan kepercayaan dan akuntabilitas yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan publik. Selain itu, prinsip keadilan yang merupakan inti dari Baitul Mal dapat memberikan inspirasi bagi pengelolaan keuangan publik dengan memastikan bahwa dana didistribusikan secara adil dengan memperhatikan kebutuhan semua lapisan masyarakat. Dengan mengikuti model Baitul Mal, pemerintah dapat membuat kebijakan anggaran yang memprioritaskan pembangunan yang inklusif dan memberdayakan orang-orang yang kurang mampu⁷.

Konsep pemberdayaan ekonomi yang diterapkan oleh Baitul Mal juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi pengelolaan keuangan publik dengan memulai program yang tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga membantu pertumbuhan usaha kecil dan menengah dan bisnis yang bertahan lama. Selain itu, sifat syariah Baitul Mal dapat menginspirasi pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip etis dan moral dalam pengelolaan keuangan publik. Akibatnya, pengelolaan keuangan publik dapat menjadi lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia.

Terakhir, inovasi yang dilakukan Baitul Mal dalam pengumpulan dan pengelolaan dana dapat mendorong pemerintah untuk mencari cara baru untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengelola sumber daya dengan lebih efisien. Pendekatan inovatif dapat membantu pengelolaan keuangan publik memastikan keberlanjutan dalam pembiayaan program pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Karena masalah ekonomi mulai muncul pada masanya, ekonomi Islam harus berkembang pada masa khalifah ini. persamaan sosial ekonomi, seperti tindakan zakat yang tegas dan sistem keuangan yang baik dengan Bait Al-Mall yang memungkinkan distribusi yang efisien⁸.

⁷ Santoso, B. P. (2024). Inspirasi Sistem Baitul Mal dalam Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia. *Jurnal Keuangan Publik*, 12(3), 102-115.

⁸ Wibowo, A. R. (2024). Inovasi dalam Pengelolaan Keuangan Publik: Inspirasi dari Baitul Mal. *Jurnal Keuangan dan Ekonomi*, 18(2), 55-68.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode studi kepustakaan untuk menghimpun informasi yang berkaitan dengan konsep, pendekatan, prosedur, dan analisis data dalam konteks penelitian Baitul Mal dari sumber literatur seperti buku dan jurnal ilmiah. Penelitian berbasis literatur adalah jenis penelitian di mana literatur digunakan sebagai obyek penelitian. Karena hanya ada beberapa perusahaan yang menerapkan metode ini di Indonesia, pendekatan ini sangat cocok untuk negara ini.

Mengatakan bahwa penyebaran teori-teori baru dengan dukungan teknik pengumpulan data yang tepat adalah salah satu cara melakukan tinjauan pustaka. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data setelah mengumpulkan jurnal tentang sistem baitul mal di masa abu bakar as-sidiq: inspirasi untuk pengelolaan keuangan publik di Indonesia (Apriyanti, Syarif, Ramadhan, Zaim, dan Agustina pada tahun 2019).

Data yang dikumpulkan melalui proses pertimbangan jurnal sistem baitul mal selama masa abu bakar as-sidiq: sumber inspirasi untuk pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk penelitian, pengumpulan data dilakukan. Metode analisis data yang disebut sebagai reduksi data melibatkan tahapan eksplorasi, klasifikasi, arahan, pemisahan, dan organisasi data guna memungkinkan verifikasi kesimpulan akhir. Artikel dan jurnal terkait sistem Baitul Mal pada masa Abu Bakar As-Siddiq digabungkan sebagai inspirasi untuk pengelolaan keuangan publik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Baitul Mal

Baitul Mal secara etimologis berarti rumah di mana harta disimpan, dikumpulkan, atau disimpan. Ini karena dua kata Arab, "bata - yabitu - baytan," yang berarti rumah atau tempat tinggal, dan "mala - yamulu - mawlu," yang berarti harta.⁹

Dalam bukunya *Al-Amwaal Fi Daulah Al Khilafah*, Abdul Qadim Zallum mendefinisikan Baitul Mal sebagai suatu lembaga atau pihak (al-jihat) yang ditugaskan untuk menangani semua harta umat, baik itu berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul Mal juga dapat diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengawasi semua harta yang merupakan pendapatan negara¹⁰

Baitul Maal adalah organisasi atau entitas yang bertanggung jawab untuk mengelola semua harta yang dimiliki oleh masyarakat, baik dari pendapatan maupun pengeluaran negara.

Sebagian besar, Baitul Mal dilakukan oleh pemerintah atau otoritas Islam setempat. Ini adalah tanggung jawab institusi ini untuk memastikan bahwa dana didistribusikan dengan adil dan efisien kepada individu yang membutuhkan, seperti fakir miskin, yatim piatu, janda, dan orang yang terkena musibah. Selain itu, Baitul Mal juga dapat membiayai pendidikan dan pertumbuhan ekonomi, serta jalan, jembatan, dan masjid¹¹.

Keadilan, transparansi, dan akuntabilitas adalah pilar manajemen Baitul Mal. Baitul Mal harus menyimpan catatan yang jelas tentang semua transaksi keuangan sehingga masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana dana digunakan. Selain itu, Baitul Mal harus mengutamakan prinsip keadilan dalam pembagian dana, yang berarti bantuan harus diberikan kepada orang-orang yang paling membutuhkan tanpa diskriminasi.

Sepanjang sejarah, Baitul Mal telah menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Islam serta mempromosikan keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Meskipun pertama kali digunakan dalam masyarakat Muslim awal,

^{9,11} Ahyar Maarif, M., Kunci, K., Mal, B., al-Rashidin, K., pendirian, tujuan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, D., Tarbiyah, F., & Ilmu keislaman Zainul Hasan Genggong Kraksaan, I. (n.d.). *Baitul Mal pada Masa Rasulullah Saw.*

¹¹ Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*, Edisi 1 (cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group

ide-idenya telah membentuk sistem pengelolaan keuangan publik di berbagai negara, terutama dalam hal mendorong keadilan sosial dan ekonomi.

Sejarah Berdirinya Baitul Mal

Pemerintahan Islam mulai menggunakan istilah "Baitul Mal" pada tahun kedua Hijriah. Ini karena sahabat tidak setuju tentang cara membagi harta rampasan Perang Badar. Akibatnya, ayat ke-41 dari surat al-Anfal menunjukkan bahwa Allah, rasul, keluarga mereka, anak-anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil menerima seperlima dari harta rampasan¹².

Pada masa Rasulullah SAW, Baitul Mal lebih dikenal sebagai pihak yang bertanggung jawab atas semua harta benda kaum Muslimin, baik pendapatan maupun pengeluaran. Setelah peperangan, Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk segera membagikan harta yang diperoleh kaum Muslimin dari ghanimah kepada kaum Muslimin karena belum ada tempat khusus untuk menampungnya. Oleh karena itu, banyak sahabat Rasulullah SAW membagikan ghanimah pada hari yang sama. Akibatnya, pada saat itu tidak ada banyak harta tersimpan yang membutuhkan tempat atau arsip khusus untuk mengelolanya.

Dalam sejarah Islam, pembentukan Baitul Mal sangat terkait dengan masa awal kekuasaan Islam setelah kematian Nabi Muhammad, terutama selama masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Sidiq, yang merupakan Khalifah pertama setelahnya. Ini terjadi menjelang pertengahan abad ke-7 Masehi.

Ketika Abu Bakar naik menjadi Khalifah pada tahun 632 Masehi, umat Muslim baru saja menghadapi peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu wafatnya Nabi Muhammad. Di tengah situasi ini, Abu Bakar dihadapkan dengan tugas besar untuk memimpin dan menyatukan umat Islam serta mempertahankan wilayah yang baru saja dikuasai dalam perang-perang yang dilakukan Nabi¹³.

Salah satu tindakan Abu Bakar adalah mendirikan Baitul Mal. Saat ini, Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga keuangan negara yang mengumpulkan dan mengelola kekayaan umat Islam, termasuk dana yang dikumpulkan dari zakat, infak, sedekah, dan harta rampasan perang. Dana ini kemudian digunakan untuk membantu janda, yatim piatu, fakir miskin, dan orang lain yang membutuhkan bantuan.

Pengelolaan Baitul Mal

Selama masa kekhalifahan Abu Bakar, Baitul Mal diurus dengan sangat baik dan adil. Setelah diangkat sebagai khalifah pertama umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad ﷺ, Abu Bakar memiliki tugas besar untuk memastikan bahwa dana yang dikumpulkan dari umat Muslim digunakan dengan benar dan efisien. Salah satu tanggung jawab utama Abu Bakar adalah mengelola Baitul Mal, yaitu kas negara yang mengumpulkan dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim. Untuk memastikan ini dilakukan dengan penuh transparansi, integritas, dan keadilan, Abu Bakar mengambil langkah-langkah konkret⁵.

Abu Bakar, khalifah yang adil dan bijaksana, memahami betapa pentingnya memastikan bahwa infak, sedekah, dan zakat digunakan secara efektif untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung. Abu Bakar menciptakan sistem pencatatan yang rapi dan akurat untuk mencatat semua pendapatan dan pengeluaran Baitul Mal, yang memungkinkan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana. Selain itu, dia menempatkan perhatian khusus pada prinsip keadilan dalam pengelolaan Baitul Mal, yang memastikan bahwa dana dialokasikan secara adil untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Selama pemerintahan Abu Bakar, Baitul Mal digunakan untuk membantu orang miskin, janda, dan anak yatim, serta untuk membangun infrastruktur yang diperlukan untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekhalifahan. Abu Bakar juga memahami bahwa

¹² Miswanto, Agus, and M. Zuhron Arofi. "Sejarah Islam dan Kemuhammadiyah." *Magelang: P3SI UMM* (2012).

¹³ Busthanul Arifin, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 186.

keberhasilan kekhalifahan juga bergantung pada kepemimpinan yang baik dalam politik dan militer, serta manajemen keuangan yang efektif dan pengelolaan sumber daya yang efisien¹⁴.

Selain itu, Abu Bakar menggunakan dana dari Baitul Mal untuk membantu para penyebar agama Islam dalam menyebarluaskan dakwah dan membangun masjid-masjid serta lembaga pendidikan sebagai bagian dari upayanya untuk memperluas dan memperkuat Islam. Dia menyadari bahwa dalam upaya untuk memperkuat keberadaan umat Islam, membangun infrastruktur sosial dan agama yang kuat sangat penting.

Baitul Mal berfungsi sebagai alat penting untuk menyebarkan keadilan sosial dan ekonomi di kalangan Muslim selama masa kekhalifahan Abu Bakar. Meskipun dia dihadapkan pada sejumlah tantangan politik dan ekonomi, Abu Bakar berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan sosial, sebagian besar berkat manajemen Baitul Mal yang teliti¹⁵. Kesuksesan Baitul Mal selama pemerintahan Abu Bakar menunjukkan bahwa pemimpin dapat menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan umat, dengan kepemimpinan yang adil, transparan, dan manajemen yang efisien.

Di Indonesia, "pengelolaan Baitul Mal" adalah istilah yang mengacu pada upaya pemerintah atau lembaga yang ditunjuk untuk mengumpulkan, mengawasi, dan mendistribusikan dana publik yang berasal dari zakat, infak, sedekah, dan sumbangan sukarela lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tujuan pengelolaan Baitul Mal adalah untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat Muslim di negara tersebut, serta untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan.

Keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat adalah pilar pengelolaan Baitul Mal di Indonesia. Semua uang yang dikumpulkan dan dikelola Baitul Mal harus didistribusikan secara adil kepada orang-orang yang paling membutuhkan. Untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi, semua transaksi keuangan harus dicatat dengan jelas dan laporan keuangan harus dipublikasikan secara terbuka¹⁶.

Di Indonesia, pengelolaan Baitul Mal juga melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pengumpulan dana dan pengawasan penggunaan dana tersebut. Masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam pengumpulan dana, memberikan masukan tentang hal-hal yang dibutuhkan masyarakat, dan mengawasi bagaimana dana tersebut digunakan untuk memastikan bahwa mereka berjalan dengan baik dan efisien.

Untuk memastikan bahwa semua operasi Baitul Mal sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, hukum yang berlaku, dan kebutuhan dan keinginan masyarakat, pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi pengelolaan Baitul Mal. Dengan pengelolaan yang baik dan bertanggung jawab, Baitul Mal di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Muslim serta mempromosikan ekonomi Islam¹⁷.

Ekonomi Islam pada masa Abu Bakar

Ekonomi Islam pada masa Khalifah Abu Bakar adalah tahap awal perkembangan sistem ekonomi Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad ﷺ. Sebagai pengganti pertama Rasulullah ﷺ, Khalifah Abu Bakar menghadapi banyak tantangan dalam membangun ekonomi yang menganut prinsip-prinsip Islam. Memperbaiki sistem zakat dan harta warisan (fai) adalah salah satu tindakan penting Abu Bakar. Dia menjamin

¹⁴ Wardani, H. K., & Tho'in, M. (2013). Pengelolaan Baitul Maal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Negara. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 14(01).

¹⁵ Minardi, A. (2021). Politik Islam.

¹⁶ Fitrah, Iwan, Iwan Triuwono, and Noval Adib. "Prinsip-prinsip good governance pada pengelolaan zakat dalam perspektif Qardhawi: Studi pada baitul mal Kabupaten Aceh Tengah." *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 8.1 (2017): 21-44.

¹⁷ Huda, Nurul. *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis*. Amzah, 2022.

bahwa kekayaan yang diberikan kepada negara dikelola dengan baik dan didistribusikan kepada muallaf, fakir miskin, dan dhuafa¹⁸.

Selain itu, Abu Bakar mempertahankan kebijakan Nabi Muhammad ﷺ dalam memperkuat hubungan ekonomi antara suku-suku Arab dan suku-suku non-Arab yang baru memeluk Islam. Dia juga menerapkan aturan untuk mengatur perdagangan dan mencegah praktik yang bertentangan dengan keadilan Islam. Selain itu, Abu Bakar meningkatkan infrastruktur ekonomi dengan membangun sistem perbendaharaan yang lebih efisien dan jaringan transportasi¹⁹.

Secara keseluruhan, meskipun masa pemerintahannya relatif singkat, Abu Bakar mewarisi dan menerapkan banyak prinsip ekonomi Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ﷺ serta mengambil langkah-langkah konkret untuk memperkuat fondasi ekonomi Islam di masa itu. Sebagai khalifah pertama, Abu Bakar mengambil langkah-langkah konkret untuk memperkuat fondasi ekonomi Islam di masa itu. Pengelolaan Baitul Mal, tempat dana publik didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan keagamaan, merupakan pilar ekonomi Islam pada masa Abu Bakar.

Pengawasan Baitul Mal oleh Abu Bakar menunjukkan komitmen kuat terhadap keadilan sosial dan ekonomi. Zakat, infak, dan sedekah adalah contoh sumber dana yang teliti yang diperiksa untuk memastikan bahwa dana tersebut didistribusikan dengan tepat kepada yang paling membutuhkan²⁰.

Abu Bakar menyadari pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana publik, jadi dia membuat sistem pencatatan yang ketat untuk mencatat semua pendapatan dan pengeluaran Baitul Mal. Ini memungkinkan pengawasan yang ketat terhadap cara dana digunakan, dan memungkinkan pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya. Ekonomi Islam berkembang secara internal dan internasional selama masa kekhalifahan Abu Bakar. Perdagangan dan hubungan ekonomi dengan negara-negara tetangga meningkat karena kebijakan ekonomi yang bijaksana dan stabil yang dia gunakan²¹.

Baitul Mal tidak hanya digunakan untuk membantu orang miskin dan kaum yang membutuhkan, tetapi juga membantu proyek pembangunan infrastruktur, yang merupakan bagian penting dari kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Abu Bakar mendorong pengusaha, petani, dan pedagang untuk berinvestasi dan berinovasi, mendorong kewirausahaan dan usaha mandiri²².

Islam memainkan peran penting dalam mengatur dan mengawasi pasar selama masa Abu Bakar, dengan mengatur praktik bisnis dan perdagangan untuk menjamin integritas dan keadilan. Ekonomi Islam yang sukses di bawah pimpinan Abu Bakar tidak hanya bergantung pada pencapaian ekonomi yang nyata, tetapi juga pada prinsip moral dan etis yang ditanamkan di dalamnya²³.

Masyarakat Muslim dihargai dan didorong untuk memberikan kontribusi positif untuk perkembangan ekonomi dan sosial selama masa kekhalifahan Abu Bakar. Dia menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat.

¹⁸ Iqbal, M., & Andika, A. K. (2023). Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Khalifah Abu Bakar Dengan Khalifah Ali Bin Abi Thalib. *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)*, 7(1), 6-19.

¹⁹ Katimin, K. (2017). *POLITIK ISLAM: Study Tentang Aqas, Pemikiran, dan Praktik dalam Sejarah Politik Umat Islam* (Vol. 1, No. 1). Perdana Publishing.

²⁰ Katimin, K. (2017). *POLITIK ISLAM: Study Tentang Aqas, Pemikiran, dan Praktik dalam Sejarah Politik Umat Islam* (Vol. 1, No. 1). Perdana Publishing

²¹ Yunita, M. (2019). Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Investasi Perspektif Politik Hukum. *Madani*, 9(1), 99-116

²² Minardi, A. (2021). Politik Islam.

²³ Wahyudi, M. (2024). *Implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal (Analisis Program Beasiswa Pendidikan Di Baitul Mal Kota Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum).

Untuk mendorong perdamaian dan kerja sama ekonomi antara orang Muslim dan non-Muslim, Abu Bakar membangun hubungan dagang yang menguntungkan dengan berbagai komunitas dan kelompok di wilayah kekhalifahan. Abu Bakar berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran umat Islam melalui kebijakan ekonomi yang berwawasan luas dan berorientasi pada keadilan.

Ekonomi Islam yang sukses pada masa Abu Bakar tidak hanya memberikan contoh bagi generasi berikutnya, tetapi juga meninggalkan warisan yang signifikan dalam sejarah Islam yang masih digunakan hingga saat ini.

Kesimpulan

1. Baitul Mal memainkan peran penting dalam pengelolaan keuangan publik Islam, terutama di masa awal Islam di bawah kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq.
2. Sistem Baitul Mal yang didirikan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq digunakan sebagai inspirasi untuk pengelolaan keuangan publik di banyak negara, termasuk Indonesia, dengan menggunakan prinsip keadilan, transparansi, dan kepedulian kepada yang paling membutuhkan.
3. Pengelolaan Baitul Mal pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi
4. Sejarah berdirinya Baitul Mal menunjukkan bahwa sejak awal Islam, lembaga ini telah menjadi instrumen penting dalam pengaturan ekonomi dan sosial masyarakat Muslim.
5. Pengelolaan Baitul Mal di Indonesia mengikuti prinsip-prinsip Islam saat mengumpulkan, mengawasi, dan membagikan dana.
6. Pengelolaan Baitul Mal di Indonesia memerlukan partisipasi masyarakat yang aktif dalam pengumpulan dana serta pengawasan bagaimana dana tersebut digunakan untuk memastikan bahwa mereka bekerja dengan baik dan efektif.
7. Pemerintah Indonesia memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengatur Baitul Mal untuk memastikan bahwa itu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan kebutuhan masyarakat.
8. Ekonomi Islam berkembang pesat selama masa Abu Bakar Ash-Shiddiq dengan memperbaiki sistem zakat dan harta warisan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
9. Prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada yang paling membutuhkan digunakan dalam pengelolaan Baitul Mal.

Daftar Pustaka

- Wahyudi, M. (2024). *Implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal (Analisis Program Beasiswa Pendidikan Di Baitul Mal Kota Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum).
- Umam, K., Hamada, S., & Pikri, F. (2022). *Kebijakan Publik dalam Peradaban Islam Edisi 1*. Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung. (buku)
- Alfikri, M. (2022). *Pengantar Komunikasi Politik Islam* (Vol. 1). Academia Publication. (buku)
- Yunita, M. (2019). Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Investasi Perspektif Politik Hukum. *Madani*, 9(1), 99-116.
- Sihombing, A. N. S. (2021). *Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kec. Medan Maimun)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Imam, P. (2022). *Implementasi Program Zakat Produktif Pertanian Dalam Meningkatkan Produktifitas Dan Ketahanan Pangan Mustahik (2020-2021)(Studi Program Zakat Produktif Pertanian Oleh Baznas Bandar Lampung)* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

- Katimin, K. (2017). *POLITIK ISLAM: Study Tentang Azas, Pemikiran, dan Praktik dalam Sejarah Politik Umat Islam* (Vol. 1, No. 1). Perdana Publishing.
- Amirulkamar, S., & Januar, E. Politik dan Pemerintahan Islam.
- Minardi, A. (2021). Politik Islam.
- Amri, S. (2023). Diklat Fiqh Siyasah.
- Kabila, P. K. D. K., & Biadihi, L. D. Univeristas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Wardani, H. K., & Tho'in, M. (2013). Pengelolaan Baitul Maal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Negara. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 14(01).
- Hidayat, A. M., & Hakim, C. L. (2021). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Terhadap Peningkatan Kemampuan Pendanaan Usaha Dengan Sistem Mudharabah. *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman Kuningan*, 2(3), 200-209.
- Hinaya, I. Sistem Ekonomi Pada Masa Khulafah Al-Rasyidin.
- Maarif, M. A., & Firdausiyah, V. (2019). Baitul Mal pada Masa Rasulullah Saw dan Khulafaur Al-Rashidin. *Ayy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 137-150.
- Marimin, A. (2014). Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 14(02).
- Nafis, F. Bab II Masa Abu Bakar As-Siddiq. *Sejarah Kebudayaan Islam*, 24.
- Hasanah, R. A., Husna, R., Anjasya, G., Tanjung, F. A., & Nasution, M. (2024). Perekonomian Pada Masa Al-Khulafa'Al-Rasyidin. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 45-53.
- Aprilya, N. W. (2019). Kebijakan Ekonomi Pada Masa Khulafaurasyidin.
- Febrianti, E., Sabri, S., Asnah, A., & Al-Amin, A. A. (2023). Komparasi Pengelolaan Pendapatan Negara Dari Sektor Zakat Di Masing-Masing Periode Kalifah Ar Rasyidin. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 11021-11032.
- Putri, F., & Kurniawan, R. R. (2022). Sejarah Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah Dan Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq.
- Iqbal, M., & Andika, A. K. (2023). Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Khalifah Abu Bakar Dengan Khalifah Ali Bin Abi Thalib. *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)*, 7(1), 6-19.
- Suherman, E., Rusyana, A. Y., & Bisri, H. (2023). Analisis Teori Perubahan Hukum Dalam Kebijakan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 10(2), 200-210.
- Putra, T. W., Abidah, N., Khaerunnisa, U., & Risma, R. (2022). Pengaruh Brand Awareness, Transparansi dan Kepercayaan Dalam Menyalurkan ZIS Di Aplikasi kitabisa.com. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 9(2), 184-205.
- Subagiya, B. (2023). Eksplorasi penelitian Pendidikan Agama Islam melalui kajian literatur: Pemahaman konseptual dan aplikasi praktis. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(3), 304-318.